

## **PARTAI POLITIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI: PERANAN PARTAI DALAM ERA REFORMASI**

Syahrial Syarbaini  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
syahrialsyarbaini@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tujuan dari tulisan ini adalah melakukan kajian terhadap partai politik di Indonesia dalam proses demokratisasi, khususnya di era reformasi periode 1998-2010. Partai politik melalui fungsi-fungsinya memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas demokrasi, peranan itu terlihat bagaimana proses kaderisasi, ideologi, keuangan, figure dan manajemen partai mempengaruhinya, namun peranan itu kurang mampu dimainkan oleh partai sehingga proses demokrasi Indonesia lebih banyak disuarakan oleh organisasi non-partai.

**Kata kunci:** demokratisasi, Ideologi, Kaderisasi

### **Pendahuluan**

Dalam perkembangan politik Indonesia, partai telah memiliki kekuasaan untuk melakukan legitimasi atau mobilisasi dalam rangka partisipasi politik. Namun, dalam perkembangannya setelah reformasi 2000an partai masih kurang menunjukkan perannya dalam demokratisasi di Indonesia. Kondisi politik dalam negeri Indonesia telah mengalami perubahan untuk proses demokratisasi. Tetapi partai gagal memainkan peranan mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia.

Menurut kajian Neumann (1982), Miriam (1980) dan Riswanda (1994), partai politik memiliki fungsi-fungsi, yaitu: komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mendidik warga negara bertanggung jawab, memilih calon-calon pemimpin politik, memaksimalkan keterlibatan warga negara dalam proses politik dan mengatur konflik dalam masyarakat. Melalui fungsi-fungsi partai politik seperti tersebut di atas, maka partai politik dapat berhasil memainkan peranan dalam proses demokratisasi suatu negara.

Disamping itu, partai politik memerlukan suatu kondisi dan faktor yang menyebabkan ia dapat berhasil memainkan peranan dalam demokratisasi, apabila melihat negara-negara dunia Ketiga, seperti kajian Mehden (1980), Rendall (1988) dan Hendenius (1992) yang menyatakan bahwa negara-negara dunia Ketiga lebih banyak dikuasai oleh pemerintahan otoriterian, akan tetapi pada tahun 1980an gerakan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia sudah menjadi isu universal. Oleh sebab itu partai politik di dunia Ketiga, juga di Indonesia pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru berpeluang memainkan perannya dalam proses demokratisasi suatu negara. Tinjauan pustaka ini lebih lanjut akan diuraikan pada bagian pembahasan.

Tulisan ini mencoba melihat beberapa fenomena parpol dalam sistem politik Indonesia semenjak reformasi 1999, khususnya era Presiden SBY adalah sebagai berikut:

1. Parpol tidak lepas dari jerat korupsi, seperti yang terjadi pada instansi pemerintah, bahkan sejumlah perilaku politikus DPR meminta Komisi Pem-

- berantas Korupsi menghentikan penanganannya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan mereka dari beberapa partai politik.
2. Sistem multi partai secara teori dapat membuat pemerintah menjadi demokratis, tetapi Indonesia, sistem multi partai dinilai lebih menguntungkan elite politik sedangkan rakyat tidak mendapatkan banyak keuntungan karena belum mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.
  3. Rendahnya etika politik dan kebutuhan mendapatkan perlindungan hukum menjadi alasan utama sejumlah kepala daerah “berpindah” partai politik, khususnya berpindah ke partai penguasa.
  4. Pengelolaan dana partai politik tidak transparan dan tidak pernah dipertanggung jawaban kepada publik maupun konstituen.
  5. Penguatan figur dalam kepemimpinan parpol menjadi faktor penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya disamping itu mengesampingkan peranan dan ideologi partai dan lain-lain.

Kegiatan politik partai dalam hubungannya dengan proses demokratisasi Indonesia era reformasi, khususnya era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama dalam aspek manajemen partai. Beberapa konsep politik yang menjadi dasar kajian adalah konsep ideologi, kepemimpinan dan komitmen partai kepada demokrasi.

Pendekatan yang digunakan ialah dengan cara kaedah analisis deskriptif dan interpretasi kritis, terutama sekali dalam penelitian fakta-fakta yang berhubungan dengan persoalan. Kajian perpustakaan untuk merumuskan kerangka teorikal, sedangkan data-data empiris dilakukan melalui dokumen-dokumen dari media massa

yang menjelaskan tentang peranan partai dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pendekatan analisis dan interpretasi kritis digunakan menurut J.Vredendregt (1984:34) bahwa tujuan utama dari penyelidikan kritis ialah untuk menganalisis realita sosial politik yang kompleks dalam konteks demokratisasi suatu negara. Pada hakikatnya kajian ini berusaha untuk menempatkan realita sosial politik yang diteliti melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh ilmuan politik.

Alat-alat analisis yang digunakan ialah pendekatan interpretasi kritis secara “*structural historis*”, dan menempatkan relita sistem politik berdasarkan teori-teori ilmu politik. Pengumpulan data primer melalui dokumen-dokumen kenegaraan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penyelidikan perpustakaan dan internet / penerbitan majalah dan surat khabar.

### **Pembahasan**

Dalam bagian ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka dengan judul “Partai Politik dan perannya dalam demokratisasi di era Presiden SBY”,

### **Partai Politik Dalam Demokratisasi**

Dalam masyarakat yang besar, rakyat hanya dapat memberikan pengaruh yang kecil sebagai individu, tetapi pengaruh itu dapat bertambah jika mereka bergabung dengan membentuk sesuatu persekutuan. Menurut Beetham & Kevin Boyle (1998), partai-partai politik menyatukan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan serta kepentingan-kepentingan yang sama untuk memperjuangkan jabatan/kekuasaan dan pengaruh politik.

Dalam ilmu politik, demokrasi, partai politik dan konsep modernisasi sering diperdebatkan yang selalu berhubungan. Orang-orang yang bersikap kritis, selalu berfikir tentang pilihan yang terbaik

dari segala masalah yang dianggap baik (Riswanda 1994). Kesempatan untuk menyampaikan berbagai kepentingan dalam masyarakat adalah persoalan hak individu merupakan prinsip ajaran demokrasi. Berbagai kepentingan tersebut disalurkan kepada partai politik agar sampai kepada sistem politik. Oleh sebab itu partai politik ialah output demokrasi dan modernisasi, yang mana kehadiran partai politik itu bermakna dalam masyarakat berbeda pendapat atau pikiran, tujuan dan kepentingan. Berbagai kepentingan itu tidak selalu harmonis, konflik kepentingan merupakan inti dari demokrasi. Oleh sebab itu kehadiran partai politik pada dasarnya adalah alat penyederhanaan konflik yang ada dalam masyarakat (Schattschneider 1960).

Partai politik dalam negara demokrasi berpeluang untuk menyalurkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, apabila partai politik minimal turut serta dalam pemilihan umum dan dapat menempatkan wakil-wakil mereka di parlimen atau pemerintahan (Riswanda 1994). Kehidupan politik yang demokratis tidak hanya sekedar dicirikan dengan adanya partai dan jumlah partai tertentu, tetapi yang lebih penting terdapat atau tidaknya persaingan di antara partai yang ada (Riswanda 1994).

Mengikut Schumpeter dan Anthony Downs, demokrasi secara sederhana ialah suatu mekanisme pasar: para pemilih ialah konsumen, para ahli politik sebagai pengusahanya, partai-partai yang berbeda-beda didirikan masuk ke dalam persaingan untuk mendapatkan dukungan massa (Varma 1995). Dahl (1992) juga menyatakan bahwa para pemilih merupakan kepentingan utama dalam menentukan kebijakan dan proses yang menentukan bahwa para pemimpin politik akan lebih tanggap terhadap kepentingan warga negara biasa.

Dalam menjelaskan hubungan antara partai politik dengan proses demokratisasi, uraian ini mencoba menjawab persoalan dalam kajian teoritis, yaitu:

### **1. Apakah peranan partai politik dalam proses demokratisasi suatu negara?**

Berdasarkan pengertian dan prinsip demokrasi oleh Ebenstein (1997), Mayo (1965), Huntington (1997), Macpherson (1972), Sartori (1995) Beetham & Kevin Borle (1998) dan Pennock (1979) dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi ialah kebebasan dan kekuasaan rakyat melalui pengambilan keputusan politik, kesetaraan setiap warga negara dalam memenuhi kepentingan, menyelesaikan masalah secara kompromi dan damai, serta pergantian pemerintah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Apabila melihat pula perluasan makna demokrasi yang dinyatakan oleh Gould (1988), Sartori (1987), Yates (1967), Ware (1987), Held (1993), Lijphart (1980), Przeworki (1991) dan Alfian (1986) yang menjelaskan bahwa makna demokrasi meliputi kehidupan politik, sosial dan ekonomi, yang mana rakyat juga terlibat dalam mengurus masalah-masalah serta terlibat pula proses pengambilan keputusan di bidang politik, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan makna asas-asas demokrasi apabila dikaitkan dengan pengertian parti politik oleh Neumann (1982), Sundhaussen (1996), Beetham & Kevin Boyle (1990) dan Miriam (1994) yang menjelaskan bahwa partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan tokohnya dari masyarakat sendiri yang didirikan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum dalam kondisi politik yang demokratis. Kaitan prinsip-prinsip dan makna demokrasi di atas dengan pengertian partai politik menun-

jukkan bahwa partai politik berperan dalam proses demokratisasi suatu negara, yaitu: (1) partai politik dapat mempertemukan pelbagai kepentingan masyarakat, (2) usaha-usaha mendirikan partai politik untuk mengikuti pemilihan umum yang juga bermakna sebagai alat bagi rakyat terlibat secara efektif dalam mewujudkan kekuasaan dari rakyat, (3) partai politik dapat memainkan peranan penting dalam mengurus berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan demokrasi.

## **2. Bagaimanakah partai politik dapat memainkan peranan mempengaruhi proses demokratisasi?**

Berdasarkan fungsi-fungsi partai politik yang dijelaskan oleh Neumann (1982), Miriam (1980), Sundhausen (1996), Riswandha (1994) dan Beetham & Kevin Boyle (1998) bahwa partai politik berfungsi sebagai komunikasi antara pemerintah dengan rakyat (fungsi komunikasi politik), mendidik warga negara yang bertanggung jawab (fungsi pendidikan/sosialisasi politik), memilih calon-calon pemimpin politik (fungsi rekrutmen), memaksimalkan keterlibatan anggota masyarakat secara sadar dalam proses sistem politik (fungsi kesadaran), dan mengurus berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat (fungsi pengaturan konflik).

Melalui fungsi-fungsi partai politik seperti yang diuraikan di atas, maka proses demokratisasi sebagaimana dijelaskan oleh Maswadi (1998), Dahl (1992), Kaldor dan Ivan Vejvode (1997), Rueschemeyer (1992), Sartori (1987), Rawls (1993), Huntington (1968) dan Pennock (1979), bahwa proses demokratisasi meliputi usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik, yaitu nilai-nilai kebebasan umum secara maksimal (nilai kebebasan), kesempatan yang sama dalam pengembangan diri secara bertanggung jawab bagi setiap warga negara (nilai kesetaraan), dan

keterlibatan warga negara secara maksimal dalam proses pembuatan keputusan politik secara adil dan benar (nilai kebersamaan). Usaha-usaha proses demokratisasi ini akan dapat terwujud dalam sistem politik, apabila partai politik dapat juga memainkan peranan yang lebih konkrit dalam melaksanakan fungsi-fungsinya seperti yang dinyatakan di atas.

## **3. Apakah kondisi-kondisi atau faktor yang berkesan suatu partai politik mempengaruhi proses demokratisasi?**

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan oleh Duverger (1984), Neumann (1982), Weiner (1982), Almond (1991), dan Apter (1987) bahwa struktur partai politik yang kuat secara intern dan ekstern, kepemimpinan partai yang melembaga, pendirian suatu partai berdasarkan kesadaran hak-hak politik warga negara, dan partai politik selalu mengikuti perubahan dan keterbukaan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat, membentuk jaringan dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Pernyataan di atas, sebagai faktor dukungan intern partai politik untuk lebih berperan dalam mempengaruhi proses demokratisasi suatu negara.

Sesuai dengan penjelasan Rueschemeyer (1992), Sartori (1987), Rawls (1993), Huntington (1968), dan Pennock (1979) bahwa pengaruh proses demokratisasi didukung oleh faktor liberalisasi yang meliputi jaminan kebebasan politik yang adil, persamaan kesempatan dan asas perbedaan (pluralitas). Oleh sebab itu kondisi yang diperlukan ialah otonomi dan menghargai hak-hak orang lain, percaya terhadap hak-hak dasar individu dengan melihat sikap toleransi dan kompromi, serta warga negara yang berpendidikan yang disertai dengan semangat kebangsaan. Faktor liberalisasi ini ialah suatu kondisi

ekstern sesuatu partai politik mempengaruhi proses demokratisasi.

Walaupun, kondisi-kondisi ekstern di atas, sesuatu yang ideal yang mana partai politik berada dalam sesuatu negara, khususnya negara-negara di Dunia Ketiga atau negara-negara baru telah menerima partai politik sebagai warisan penjajahan (Mehden 1980), akan tetapi belum memberikan peranan yang berkesan kepada partai politik karena negara-negara Dunia Ketiga lebih banyak diperintah oleh pemerintahan otoriter (Mehden 1980), (Rendall 1988) dan (Hendenius 1992). Akan tetapi pada tahun 1980an gerakan demokratisasi dan hak-hak asasi manusia sudah merupakan isu sejagat. Oleh sebab itu demokratisasi sebagai isu sejagat merupakan satu kondisi bagi partai politik untuk mengambil peluang memainkan peranan dalam sesebuah negara yang sedang melalui proses transisi demokrasi. Model pembangunan politik, ciri-ciri budaya politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik suatu negara sebagaimana yang diuraikan di atas akan mempengaruhi partai politik, apakah dia berhasil atau gagal dalam mempengaruhi proses demokrasi suatu negara.

Dalam proses transisi demokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Lowenthal (1993), Pye (1982), Przeworski (1986) dan Stephan (1997) keberhasilan proses demokratisasi memerlukan kerjasama antara pemerintah (rejim otoriter) dengan oposisi, yang dilakukan secara bertingkat, yaitu: menciptakan undang-undang atau undang-undang dasar yang menjamin hak-hak individu dan berkelompok, membangunkan masyarakat umum atau warga negara (*civil society*) yang menyadari hubungan mereka dalam proses politik, mengajukan alternatif demokrasi yang dapat dipercayai. Dalam keadaan ini partai politik akan mendapat peluang yang penting untuk memainkan peranan yang berkesan dalam proses transisi demokrasi.

Konsepsi partai politik dan perannya, menitikberatkan kepada fungsi partai politik sebagai satu pendekatan utama yang digunakan dalam kajian ini. Menurut Neumann (1981), Sundhaussen (1996), Beetham & Kevin Boyle (1990) dan Miriam (1994) yang menjelaskan partai politik dapat dirumuskan sebagai organisasi untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan anggotanya dari masyarakat sendiri yang didirikan untuk mendapat kekuasaan melalui pemilihan umum dalam keadaan politik yang demokratis. Hubungan prinsip-prinsip dan makna demokrasi di atas dengan pengertian partai politik menunjukkan bahwa partai politik berperanan dalam proses demokratisasi suatu negara, iaitu: (1) partai politik dapat mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, (2) usaha-usaha mendirikan partai politik untuk mengikuti pemilihan umum yang juga bermakna sebagai perwujudan kekuasaan dari rakyat, (3) partai politik dapat peranan penting dalam mengatur berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan demokrasi.

Pengaruh keadaan politik dalam negeri juga turut mempengaruhi peranan partai politik dalam proses demokratisasi, iaitu: model pembangunan yang digunakan oleh suatu negara yang sedang membangun, budaya dan ideologi serta bentuk partisipasi politik yang berlaku. Di antara pakar politik, Huntington dan Nelson (1976), dan Almond dan Powell (1966) bahwa peranan parti politik di suatu negara membangun dapat dirumuskan bahwa: Pertama, proses pembangunan politik ditandai dengan persamaan, pertambahan kemampuan dan partisipasi politik plura-listik, yang mana partai politik dapat memainkan peranan penting dalam sistem politik. Kedua, partai politik dapat memainkan peranan yang penting dalam sesuatu negara yang mempraktekkan model pembangunan populis demokratik, tetapi dalam mo-

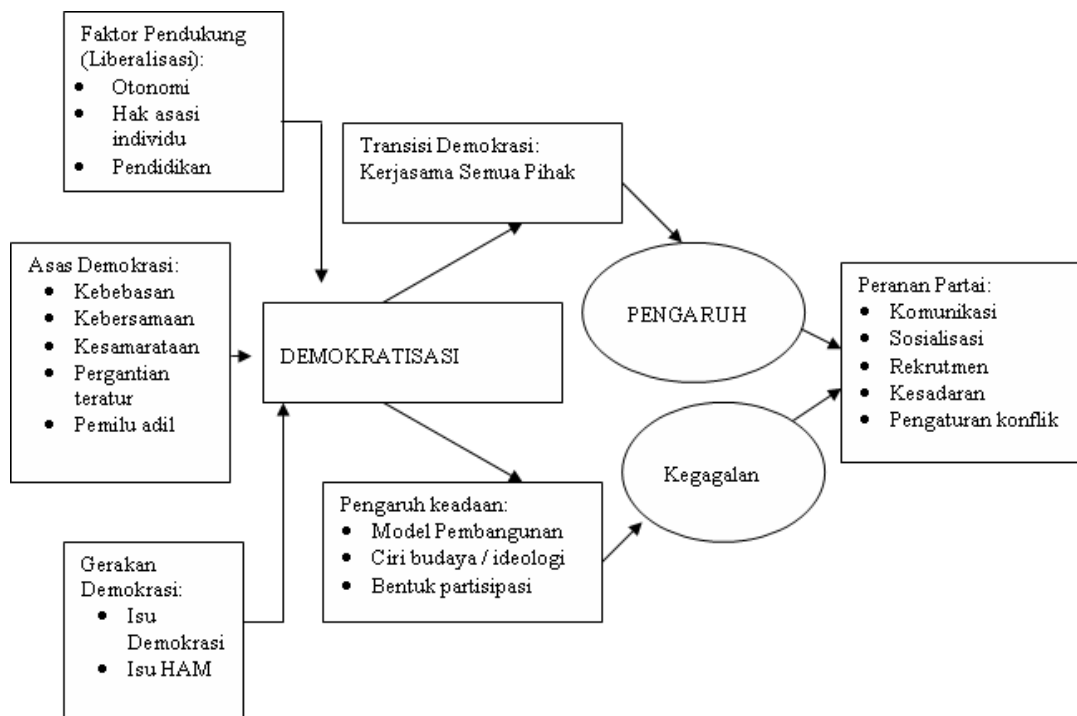
del pembangunan yang lain, seperti otoritarian teknokratik egalitarian partai politik tidak dapat melaksanakan peranan dan fungsinya yang lebih berkesan kerana partai mendapatkan kontrol dari penguasa demi untuk berhasil pembangunan ekonomi.

Menurut Apter (1965), Weiner (1981), Sundhaussen (1996) dan Ricoveur (1998) bahwa dalam suatu negara membangun, khususnya dalam pembangunan ekonomi peranan negara sangat dominan dengan ciri budaya politik yang mengatur setiap aspek kehidupan, yang mana partai bertindak untuk kepentingan elit yang berkuasa dan bahkan juga menempatkan partai dibawah kontrol birokrasi.

Menurut Huntington dan Nelson (1994), Pye (1965), Rustow (1963), Organski (1965) dan Weiner (1971), partai

politik dalam partisipasi politik dapat disimpulkan, ialah: 1) partai politik ialah satu di antara pelbagai organisasi kelompok dalam sesuatu negara yang mempelopori partisipasi politik dengan fokus kepada pemilihan umum, usaha-usaha mempengaruhi keputusan politik dan kegiatan mempengaruhi pegawai negeri, (ii) pada negara-negara baru partai politik dihadapkan kepada masalah-masalah, seperti kemiskinan dan kebodohan, yang mana partai politik kurang berhasil menyelesaikan masalah ini sehingga memberi peluang kepada militer berkuasa cukup lama, dalam keadaan ini kegiatan partai terbatas peranannya.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka kajian tentang peranan partai politik dalam demokratisasi adalah sebagaimana tertera dalam bagan berikut ini.



Catatan : Bagan ini menunjukkan bahwa demokratisasi mengandung nilai-nilai / dasar yang mendapat dukungan dari faktor liberalisasi, gerakan demokrasi dan

hak asasi manusia. Keberhasilan demokratisasi melalui kerjasama semua pihak dalam transisi politik kearah demokratis di sesuatu negara (khususnya negara baru),

dalam keadaan ini partai politik dapat memainkan peranan dalam demokratisasi. Kegagalan partai politik dalam memainkan peranan dalam proses demokratisasi juga disebabkan oleh sistem politik digunakan oleh pemerintah / negara

### **Partai Politik di Era Reformasi**

Definisi Partai Politik (parpol) menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik menyatakan “ suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan definisi tersebut, parpol berfungsi sebagai saluran untuk menghimpun seluruh dukungan dari masyarakat sesuai dengan aspirasinya. Keberadaan partai politik dalam suatu negara sangat ditentukan oleh sistem politik atau sistem demokrasi yang berlaku dalam suatu negara, partai politik dapat mempengaruhi sistem demokrasi yang berlaku, sebaliknya sistem politik yang berlaku akan menentukan ruang gerak dari parpol.

Angin perubahan yang berhembus setelah rejim Suharto tumbang, kebebasan pers memberi peluang lahirnya partai politik baru dengan beragam ideologi bermunculan baik dalam bentuk ide-ide personal maupun kelompok atau organisasi. Berdiri 48 parpol yang lolos sebagai peserta pemilihan umum dari 237 parpol yang sempat didirikan pada tahun 1999. Liberalisasi demokrasi di era reformasi yang melahirkan kembali politik aliran yang lahir tahun 1950an, disamping diperbolehkannya pendirian partai lokal dalam pemilihan langsung kepala daerah dan legislatif

di Aceh dan Papua. Partai-partai politik lokal dan nasional ini secara berkala mengendalikan kehidupan politik, sehingga menjadi incaran seluruh kekuatan ekonomi, politik dan kelompok-kelompok kepentingan lain (Piliang. 2008:251).

Kehadiran parpol mengalihkan konflik horizontal yang berdarah menjadi persaingan bendera dan nama tokoh, satu sisi fungsi parpol untuk mengendalikan konflik telah dijalankan secara empiris. Namun persaingan politik yang terjadi tidak seimbang dimana kalangan yang sudah memiliki jaringan dan infrastruktur luas, seperti Golkar, PDI Perjuangan dan PPP berhadapan dengan partai politik baru yang bermodalkan ideologi dan idealisme, maka hukum pasar dalam ekonomi berlaku yang pada akhir yang menguasai “modal” mengendalikan pasar. Akhirnya politik dikendalikan oleh tokoh-tokoh lama di era Orde Baru. Tokoh lama di parpol era reformasi muncul lagi dengan mengandalkan modal dan popular, sementara partai kurang dikelola secara profesional, sehingga konsep massa mengambang masih mewarnai parpol, seperti kehadiran pemimpin – pemimpin kharismatik berdasarkan sentiment primordial, melupakan *platform*, program kerja atau visi dari parpol.

Keterpurukan dalam ekonomi membawa perilaku penduduk mempengaruhi perilaku politik, sehingga kekuatan pe-modal besar dapat memasuki dan menggerakkan kehidupan politik. Kehadiran tek-nologi informasi yang bebas telah melahirkan maraknya politik image dan citra. De-mokrasi berkembang dalam wujudnya prosedural ketimbang substansi, agenda media massa menjadi agenda alite. Demo-krasi yang menjunjung partisipasi sebagai suatu “*civil society*” lebih banyak diwakili oleh elite massa, dalam arti karakteristik interaksi antara elite penguasa (state actors) dan elite massa (society actors), maka sulit dihindari praktek kolusi

atau korupsi antara elite massa dan elite penguasa dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan menjadi karakter utama dalam proses pengambilan keputusan politik (Hidayat. 2007).

### **Kelemahan Partai Politik**

Partai politik era reformasi lebih fokus pada upaya memperoleh kekuasaan semata, kurang dalam pendidikan politik serta pemenuhan kepentingan rakyat. Menurut jajak pendapat (*Kompas* 23 Maret 2010), mayoritas responden menyatakan tidak puas atas kinerja parpol, terutama sembilan parpol yang ada di DPR (Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Hanura dan Partai Gerindra). Citra negatif terhadap parpol ditengarai terjadinya lantaran ada kesenjangan yang terlalu besar antara politisi dan pejabat, baik legislatif maupun eksekutif dengan masyarakat. Sekalipun anggota parpol yang menjadi anggota legislatif telah terjun ke masyarakat dalam rangka menjangkau aspirasi dan memberikan bantuan finansial dalam kegiatan masyarakat, namun parpol kalah bersaing dengan agen-agen demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan sebagainya.

### **Manajemen Partai Politik**

Dari fenomena yang berkembang dalam dinamika parpol di atas, dalam tulisan ini mencoba membahas aspek manajemen. Pembahasan ini melihat parpol dari segi ideologi, sumber daya manusia, keuangan, ketokohan dan perubahan. Apabila dilihat dari aspek ideologi sembilan unsur partai yang mempunyai wakil di DPR-RI, semuanya merumuskan ideologi terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu partai yang berideologi Pancasila dan Islam dengan berbagai varian. Partai yang mengusung ideologi Pancasila, yaitu Partai Demokrat, PDI-

P, Partai Golkar, Gerindra dan Partai Hanura. Partai berideologi Islam adalah PPP dan PKS, sedang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengidentifikasi dengan ideologi Pancasila dengan varian menerapkan paham ahlussunah wal jamaah, yang semula di anut Nahdlatul Ulama. PAN menegaskan bukan partai Islam, tapi berasas pluralitas dengan memperjuangkan amar makruf nahi mungkar. Ideologi Pancasila sebagai asas partai diterjemahkan sendiri, seperti Partai Gerindra menterjemahkan asas Pancasila dengan perjuangan ekonomi rakyat, khususnya kesejahteraan petani. PKS menterjemahkan asas Islam sebagai partai dakwah (*Kompas*, 23 Maret 2010). Bagaimana ideologi dapat diterjemahkan dalam platform dan dirumuskan ke dalam program? Suatu hal yang sulit karena dalam kenyataannya sembilan partai yang punya wakil di DPR-RI menjejalkan asas partai dalam realitas politik. Menurut Kuskridho (*Kompas*, 23 Maret 2010) dari pemilihan umum ke pemilihan umum perbedaan antar partai semakin kabur, kecenderungan ideologi bukanlah hal yang penting bagi suatu partai. Sekalipun ideologi dalam partai sebagai "identitas partai" karena ideologi adalah basis sistem nilai dan paham yang menjelaskan mengapa partai itu ada. Dari sisi masyarakat kejelasan sistem nilai dan paham akan memudahkan mereka dan mengidentifikasi sekaligus membedakan suatu partai dengan partai lain, sekaligus akan memudahkan komunikasi politik yang ingin disampaikan kepada target pemilih.

### **Kaderisasi Partai Politik**

Kesadaran bahwa politisi harus banyak memiliki keahlian dalam mengurus partai. Partai dalam usaha merekrut calon kader yang berkualitas melalui mantan aktivis mahasiswa atau intelektual disamping meningkatkan kemampuan kader melalui pelatihan dan kursus tertentu.



**Tabel 1**  
**Ideologi 9 Partai Politik di DPR-RI**

<b>Partai</b>	<b>Asas Ideologi</b>	<b>Visi</b>	<b>Basis Massa</b>
Partai Demokrat	Pancasila	Mewujudkan kerakyatan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.	Massa perkotaan dan pedesaan.
Partai Golkar	Pancasila	Terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, adil dan makmur	Masyarakat di luar Jawa
PDI-P	Pancasila	Mewujudkan cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan membangun masyarakat Pancasila	Kaum nasionalis dan Sukarno
PKS	Islam	Partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.	Umat Islam perkotaan.
PPP	Islam	Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia adil makmur.	Umat Islam
PAN	Ketuhanan YME, Kebangsaan yang bersatu, Kerakyatan yang demokratis	Partai terdepan mewujudkan masyarakat madani dengan pemerintahan yang bersih.	Umat kalangan Muhammadiyah
PKB	Pancasila	Tatanan politik yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan dan menyejahterakan.	Umat Kalangan NU
Gerindra	Pancasila dan UUD 1945	Menciptakan kesejahteraan bangsa, keadilan sosial dalam wadah NKRI	Massa Nasionalis
Hanura	Pancasila	Kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat	Massa nasionalis

\* Sumber: Diolah dari *Kompas*, 29 Maret 2010.

Sejumlah partai telah membangun sistem untuk men-jaring para kadernya, seperti PKS memiliki pola kaderisasi yang relatif terencana se-hingga dibutuhkan waktu delapan sampai sepuluh tahun bagi kader untuk dapat me-ngisi jabatan publik, seperti anggota DPR. Begitu juga Partai

Golkar, calon legislatif utama umumnya diisi oleh pengurus DPP Partai Golkar, dengan cara ini diharapkan mereka tidak hanya mempunyai keahlian politik, tetapi juga memahami ideologi, kebijakan dan sifat partai (Hernowo: 2010). Kebijakan itu diyakini Partai Golkar memiliki kader

berkualitas yang mampu memenangkan pertarungan politik di DPR.

Beberapa partai terutama partai baru, belum memiliki sistem pengelolaan kader seperti Partai Golkar dan PKS, dengan alasan keterbatasan waktu dan kesibukan administrasi, sehingga menyusun daftar calon legislatif dengan pertimbangan utama tingkat popularitas dan finansial, pertimbangan selanjutnya pengalaman organisasi, kompetensi dan jaringan. Partai Demokrat misalnya menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarak (*Kompas*, 30 Maret 2010) menyatakan bahwa manajemen kaderisasi masih persoalan krusial, karena minimnya pengalaman manajemen perekrutan anggota DPR amat terbuka, yaitu siapa saja yang punya bakat politik atau bakat lain dipersilakan menjadi anggota dan dapat menjadi anggota DPR. Kenyataan inilah penyebab Partai Demokrat dengan jumlah 148 kursi (terbanyak) dari 560 kursi DPR kalah dari pertarungan di DPR, seperti dalam Pansus Bank Century.

Persoalan kaderisasi juga dialami oleh PDI-P, menurut Budiman Sudjatmiko dalam sepuluh tahun terakhir partainya banyak bicara soal target suara dengan fokus pada persoalan logistik dan keuangan, melupakan militansi dan kaderisasi (*Kompas*, 30 Maret 2010). Berdasarkan uraian diatas sesuatu hal yang harus diurus oleh suatu partai dalam persoalan kualitas sumber daya manusia partai adalah persoalan kaderisasi tidak bersifat instan dan oportunistik, melainkan ada perjenjangan yang jelas untuk menduduki jabatan tertentu dan kebijakan partai harus diambil secara demokratis. Kaderisasi partai dalam jalur bidang eksekutif harus difokuskan bagaimana mengelola dan menjalankan pemerintahan yang baik, bagaimana mengelola kekuasaan bagi partai pemenang pemilihan umum untuk kesejahteraan rakyat dan bagaimana menyiapkan alternatif bagi partai oposisi.

Kualitas partai ditentukan oleh kadernya berkualitas melalui proses belajar dan pengalaman organisasi bukan pada popularitas dan banyak uang.

Proses kaderisasi mempengaruhi citra partai tersebut di mata rakyat sebagaimana jajak pendapat yang dikemukakan oleh Litbang *Kompas* (17-19 Maret 2010), yaitu: Dalam persoalan menangkap atau menyuarakan kepentingan bahwa tokoh-tokoh partai lebih banyak menyuarakan kepentingan partai politiknya (54,3%) dan kepentingan diri sendiri (34,2%) ketimbang kepentingan rakyat (7,2%). Temuan ini menunjukkan bahwa parpol kurang peduli dengan kepentingan rakyat dimana suara rakyat dipinjamnya dalam saat pemilu umum, namun parpol tidak dirasakan sebagai penyalur dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam persoalan kaderisasi unsur pengurus dan pimpinan partai dapat dirasakan oleh rakyat yang memiliki pendidikan rendah dan menengah bahwa kaderisasi belum berhasil (68,1%) ketimbang yang menyatakan berhasil (21,1%), sedangkan rakyat yang berpendidikan tinggi merasakan bahwa kaderisasi partai belum berhasil (73,8%) ketimbang yang menyatakan berhasil (19,2%).

Temuan ini menunjukkan bahwa parpol belum meninggalkan politik massa mengambang yang diterapkan di era Orde Baru, dimana terdapat jurang komunikasi politik yang jauh antara elite partai dengan massa pendukungnya. Tingkat Ketidakpuasan rakyat terhadap sembilan partai yang duduk DPR menunjukkan bahwa rakyat merasa tidak puas (antara 42,9% sampai dengan 61,9%), dilanjutkan kaderisasi partai lebih mengakomodasi kepentingan elite parpol (73%) ketimbang konstituennya (8,0%). Suatu hal yang membuktikan bahwa parpol memperjuangkan kepentingan elite atau parpolnya bukan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Parpol juga merasakan sekalipun rakyat tidak puas

dengan kinerja parpol, namun hal itu tidak mempengaruhi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum kerana pertanggungjawaban parpol tidak secara langsung kepada rakyat, dengan sistem pemilu proporsional rakyat tidak memberikan penilaian terhadap suatu partai karena semua parpol mempunyai perilaku politik yang sama.

### **Pindah Partai Demi Kekuasaan**

Kepindahan politikus dari suatu partai kepada partai lain adalah suatu fenomena ketidak konsistenan para elite partai terhadap ideologi, komitmen atau partai-partai tidak memiliki ideologi yang jelas dapat membedakan antara satu dengan lainnya. Apabila melihat hasil penelitian Litbang Kompas (*Kompas*, 30 Mei 2011) menunjukkan bahwa perpindahan partai bermotif kepada kekuasaan dan menjadi perlindungan hukum. Maka yang terjadi adalah perpindah dari berbagai partai kepada Partai Demokrat, perpindahan demi kekuasaan, seperti Dede Yusuf dari PAN ke Demokrat untuk Pilgub 2013 di Jawa Barat, Zainul Majidi (Gubernur NTB) dari PBB ke Demokrat dan Frauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta) dari Golkar ke Demokrat untuk Pilgub 2012. Sedangkan sejumlah politikus yang pindah partai ke Partai Demokrat demi perlindungan hukum, seperti Agusrin Najamuddin terdakwa kasus korupsi yang kemudian di vonis bebas oleh pengadilan Jakarta Pusat. Terjebak pragmatis dengan orientasi kekuasaan pindah kepada yang berkuasa merasa terlindungi dari korupsi (izin pemeriksaan dari Presiden), pragmatisme akan terus menerus sepanjang rakyat kalayak masih merasa bodoh dalam partisipasi. Korupsi besar sulit diselesaikan secara hukum karena semua kasus diselimuti secara politik kekuasaan, dimana suatu kasus muncul dan muncul kasus lain untuk melupakannya. Kondisi inilah yang menyebabkan para politikus yang lebih lamah berlindung kepada

partai berkuasa. Partai-partai ketika berkuasa atau bahagian dari kekuasaan terindikasi sarat dengan kasus suap dan korupsi dan tidak semua kasus itu terungkap ke publik karena “kecanggihan” parpol menutupi aib dan persekongkolan antara parpol dan aparat penegak hukum (Syamsuddin Haris, 2011; 6). Parpol terlanjur besar dan memegang kekuasaan ketika secara organisasi belum terkonsolidasi sebagai akibat kekecewaan terhadap partai Golkar, PDI-P dan parpol berbasiskan Islam pasca pemilu 1999, Partai Demokrat menjadi wadah beragam kepentingan, berbagai profesi yaitu mantan militer, pejabat, birokrasi, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan adat menjadi bagian dari partai yang hampir identik dengan sosok SBY. Kelatahan politik sejumlah kepala atau wakil kepala daerah menyeberang ke Partai Demokrat. Hal ini terjadi karena merasa nyaman dekat dengan kekuasaan sekalipun parpol belum melembaga dan bermartabat.

Wacana perpindahan politisi ke Partai Demokrat sebagai gerakan politik yang merasa tidak puas dengan posisinya sebagai pengendali pemerintah “*the rulling party*”, khusus setelah berhasil membentuk “Setgas Koalisi” bersama Golkar dan partai kecil lainnya, suatu indikasi Partai Demokrat sedang mengatur langkah kearah partai berkuasa menjadi partai para penguasa. Para kader yang berbobot secara profesional dan politik dari berbagai latar belakang jejak dan ideologi didekati untuk direkrut, sama seperti strategi “sapu jagat” yang pernah diterapkan Sekber Golkar Orde Baru (Tomagola. 2010: 6). Kader yang paling diminati adalah kepala daerah yang telah berhasil merebut hati dan pikiran rakyat pemilih. Hal ini sebagai penguangan sejarah Orde Baru untuk membangun partai para penguasa dengan berujung kepada partai tanpa nurani.

## **Dilema Keuangan Partai**

Dalam UU No. 2 tahun 2008 diatur tentang sumber keuangan partai dan besaran sumbangan. Dana kampanye juga diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, akan tetapi ketentuan perundang-undangan itu tidaklah mudah dilaksanakan, apalagi diawasi pelaksanaannya, misalnya perorangan maksimal 1 milyar dan 5 milyar per perusahaan selama setahun, bagaimana pengawasannya hal itulah yang menjadi kesulitan, ada penyumbang yang tidak perlu disebut namanya dan selalu tidak tercatat dalam rekening kas umum parpol (Ferry Santoso. 2011). Menurut temuan Kuskridho Ambardi pengajar Politik Universitas Gajah Mada mengungkapkan laporan keuangan parpol bahwa dana kampanye dibuat sesuai dengan ketentuan yang diminta, dimana jumlah dana kampanye mencapai tiga kali lipat. Dalam kondisi banyak pimpinan dan bendahara parpol sulit menjelaskan asal usul “mesin” keuangan parpol secara transparan (*Kompas*, 31 Maret 2011).

Sumber dana parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan dan dari APBN. Namun ada juga iuran kader partai yang menjabat jabatan publik dan tidak menjabat jabatan publik, bagi PKS yang terbanyak prosentasenya dari dinas lepas dan para simpatisan. Dalam kampanye pemilihan presiden (Pilpres), dana yang diperoleh seorang kader partai bisa berasal dari sumber apapun, seperti donatur, hasil usaha atau bisnis atau diduga hasil tindak pidana korupsi, karena tidak ada pembatasan dari pihak internal partai melalui simpatisan dan jabatan publik yang sangat sulit dikontrol. Kadangkala pimpinan partai (ketua umum) menjadi penyumbang dana terbesar, seperti pada Partai Golkar 40% dari ketua umumnya (*Kompas*, 31 Maret 2011). Persoalannya bagi parpol ke depan, bagaimana integritas, arah kebijakan dan program par-

tai tetap dilandasi oleh cita-cita partai, inilah penyebab melemahnya suatu partai karena sangat rentan dikuasai oleh kepentingan pemilik modal, berdampak kepada demokrasi ditentukan oleh elite partai yang memiliki keuangan. Kondisi ini sulit untuk mencegah praktek “politik uang” dalam berbagai momen demokrasi, seperti pilpres, pilkada dan pemilu legislatif. Demokrasi sulit memunculkan pimpinan yang punya integritas dan kompeten berorientasi kepada kerakyatan.

Pendanaan parpol yang sarat konflik kepentingan menyeret ke arah korupsi kartel elite, korupsi ini melibatkan jaringan parpol, pengusaha, penegak hukum dan birokrasi. Kondisi ini disebabkan oleh para pemimpin menghadapi politik dalam lembaga yang masih lemah, parpol tidak mengakar serta lebih mewakili kepentingan elite, sistem peradilan yang korup serta birokrasi yang rentan korupsi. Korupsi kartel elite dapat menghalangi dan mengkooptasi pesaing potensial, juga menghimpun pengaruh untuk menguasai keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial dan elektoral. Konflik kepentingan telah merusak kebijakan anggaran termasuk anggota DPR menjadi pemangsa. Oleh sebab itu menurut Haryatmoko (2011: 6) perlu komisi etika untuk: a) mengawasi sistem transformasi menyikapi keuangan publik, b) memeriksa laporan kekayaan, sumber pendapatan dan utang sebelum menjabat jabatan politik, c) memeriksa laporan hubungan yang beresiko untuk meminimalkan konflik kepentingan, d) pada setiap pertemuan staf dan pengambilan keputusan komisi etika diikutsertakan, memfasilitasi audit dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi dimensi etika.

**Tabel 3**  
**Dana Kampanye Partai Politik Peserta**  
**Pemilu 2009**

No.	Partai Politik	Saldo Awal	Dana Kampanye
1.	Gerindra	15 Milyar	308 Milyar
2.	Demokrat	7,2 Milyar	234,8 Milyar
3.	Golkar	156 Juta	164,5 milyar
4.	PKS	5,2 Milyar	36, 5 milyar
5.	Hanura	5 Milyar	19 milyar
6.	PAN	734 Juta	18 milyar
7.	PDI-P	1 Milyar	10,6 milyar
8.	PPP	1,6 Milyar	1 milyar
9.	PKB	1,5 Milyar	3,6 milyar

Sumber: *Kompas*. 31 Maret 2011

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya dukungan rakyat terhadap suatu partai sangat dipengaruhi dengan kekuatan modal kampanye parpol sebagai pemasaran politik, kondisi ini menunjukkan partai Gerindra sebagai pendatang baru dalam pemilu 2009 telah dapat lolos ke parlemen. Partai Demokrat dapat menduduki kursi mayoritas dan partai Golkar dapat mempertahankan posisinya di DPR juga memerlukan dana yang besar. Partai yang memiliki dana kecil sulit mendapat kursi yang kecuali hanya dengan dukungan konstituen yang fanatik dan kesetiaan massa masih mampu mempertahankan posisi pada pemilu sebelumnya sekalipun mengalami penurunan, seperti PDI-I dan disertai manajemen partai yang kuat seperti PKS. Kondisi inilah yang menyebabkan perkembangan partai kurang sehat dan kurang mampu menjalankan fungsi-

fungsinya, karena parpol semakin terikat kepada jumlah dana yang besar sehingga kadernya berusaha mendapatkan dana, sekalipun dengan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengaruh Figur dan Ide**

Kondisi pemilih dalam demokrasi Indonesia adalah 55 persen tidak lulus Sekolah Dasar (*Kompas*, 1 April 2010) bagi PPP untuk mengalang massa pemilu cukup dengan jargon yang sudah lama pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, biaya pendidikan dan kesehatan gratis atau meningkatkan jaminan sosial tidak membuat masyarakat tergiur. Partai Demokrat masih bisa menjual citra Susilo Bambang Yudhoyono untuk meraih suara terbanyak baik dalam pilpres dan pemilu legislatif. Menurut Achmad Mubarak Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengakui bahwa citra Yudhoyono menyumbang 60 sampai dengan 70% untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum 2009 (*Kompas*, 1 April 2010), Hal yang sama terjadi pada PDI-P yang mengandalkan nama besar Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri. Disamping itu loyalitas dalam bentuk ikatan politik emosional mampu dipertahankan apabila disertai dengan perilaku dan cara hidup para kader menampilkan citra positif.

Apabila kita mengutip pendapat Herbert Kitschelt (*Kompas*.2010) tiga kategori parpol, yaitu : pragmatik, karismatik dan klientalistik. Parpol programatik mengandalkan program kerja yang dilandasi oleh ideologi dan platform partai. Parpol karismatik mengandalkan figur sebagai magnet sumber suara. Sedangkan parpol klientalistik berdasarkan hubungan patronasi dimana tujuan partai lebih kepada kepentingan pribadi, partisan dan layanan balas jasa. Dua kategori parpol karismatik dan klientalistik masih mendominasi pemilu Indonesia 2009. Maka parpol akan sulit

berkembang menjadi partai modern yang dapat membangun bangsa apabila mengandalkan kategori partai karismatik atau klientalistik.

Pemilih lebih dahulu menunggu sebelum memutuskan untuk loyal kepada suatu parpol, kekecewaan terhadap suatu parpol menyebabkan pindah ke parpol lain. Ada dua segmen pemilih yang diperebutkan oleh parpol, yaitu "Islam dan nasionalis", namun parpol hanya mengandalkan jargon baik ide mauun tokoh maka masyarakat tidak akan cerdas, sosialisasi politik yang menjadi fungsi parpol tidak berfungsi. Pengalaman berdemokrasi di Indonesia telah dilalui dengan momen cukup banyak, seperti pemilu legislatif, eksekutif dan pemilukada semenjak reformasi memberikan kesan kepada masyarakat berpendidikan secara negatif terhadap parpol. Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas (1 April 2010) yang menyebutkan 54,9% persen responden menyatakan tidak percaya dengan parpol, lebih mempercayai media massa sebagai penyalur aspirasinya (42,4%).

Kondisi ini ada kecendrungan bertambah, apabila parpol belum memahami dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Parpol harus terlebih dahulu merombak sistem dan manajemen mereka menjadi lebih berparadigma modern, seperti isu-isu manajemen strategis, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran politik. Kemampuan manajemen strategis meliputi kemampuan parpol menerjemahkan ideologi menjadi visi, misi, platform parpol ke dalam program-program kerja yang kemudian menarik minat calon pemilih karena identik dengan kepentingan mereka. Parpol juga mampu mengelola dan menyiapkan keuangan, sumber daya manusia untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan strategis.

## **Modernisasi Manajemen Partai Politik**

Hasil diskusi para ahli politik Indonesia mengeluarkan rekomendasi modernisasi manajemen politik (*Kompas*, 3 April 2010) menyebutkan sebagai berikut: Aspek manajemen strategis, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. Ideologi perlu diterjemahkan menjadi platform,
2. Memetakan isu-isu publik dengan menggerakkan departemen penelitian dan pengembangan (Litbang) partai politik,
3. Perlu dibuat prioritas isu publik, dari berbagai isu yang masuk,
4. mengajukan alternatif kebijakan yang akan menentukan pilihan politik pemilih.

Aspek Manajemen pemasaran, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. Membuat segmentasi calon pemilih secara sistematis dan konsisten,
2. Membuat "*positioning*" partai berdasarkan ideologi,
3. Memperjelas diferensiasi partai politik sejak dari ideologi hingga isu-isu publik yang akan "dijual" ke publik,
4. Melakukan "*branding*" partai politik tanpa harus mengorbankan ideologi dan jati diri partai politik.

Aspek manajemen sumber daya manusia, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. Menata desain perekrutan untuk kader dan pengisian jabatan publik,
2. Perlu penjejang kaderisasi yang jelas,
3. Kriteria kader mulai ditetapkan, seperti pendidikan, pengalaman, dan spesialisasi keahlian,
4. Perlu pelatihan sistematis untuk kader,

5. Perlu penerapan meritokrasi dan promosi untuk kader-kader yang berkualitas,
6. Perlu peningkatan demokrasi di tingkat internal untuk pengambilan keputusan.

Aspek manajemen keuangan, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. Mendesain iuran anggota sebagai sumber utama keuangan partai politik,
2. Membangun jaringan pengusaha seideologi untuk memobilisasi dana privat, mulai memperjuangkan perundang-undangan yang memungkinkan partai politik membentuk badan usaha sendiri, tetapi dengan pengawasan sangat ketat,
3. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dengan laporan keuangan yang memadai.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Partai politik era reformasi lebih fokus pada upaya memperoleh kekuasaan semata, kurang dalam pendidikan politik serta pemenuhan kepentingan rakyat. (2) Parpol kalah bersaing dengan agen-agen demokrasi lainnya dalam menyalurkan aspirasi rakyat. (3) Suatu hal yang sulit karena dalam kenyataannya sembilan partai yang punya wakil di DPR-RI mengejawantahkan asas partai dalam realitas politik. (4) Partai dalam usaha merekrut kader yang berkualitas melalui mantan aktivis mahasiswa atau intelektual disamping meningkatkan kemampuan kader melalui pelatihan dan kursus tertentu. (5) Beberapa partai terutama partai baru, belum memiliki sistem pengelolaan kader dengan alasan keterbatasan waktu dan kesibukan administrasi. (6) Manajemen kaderisasi masih persoalan

krusial, karena minimnya pengalaman manajemen perekrutan anggota DPR amat terbuka, yaitu siapa saja yang punya bakat politik atau bakat lain dipersilakan menjadi anggota dan dapat menjadi anggota DPR. (7) Parpol kurang peduli dengan kepentingan rakyat dimana suara rakyat dipinjamnya dalam saat pemilu umum, namun parpol tidak dirasakan sebagai penyalur dan memperjuangkan kepentingan rakyat. (8) Parpol belum meninggalkan politik massa mengambang yang diterapkan di era Orde Baru, dimana terdapat jurang komunikasi politik yang jauh antara elite partai dengan massa pendukungnya. (9) Parpol juga merasakan sekalipun rakyat tidak puas dengan kinerja parpol, namun hal itu tidak mempengaruhi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum kerana pertanggungjawaban parpol tidak secara langsung kepada rakyat, dengan sistem pemilu proporsional rakyat tidak memberikan penilaian terhadap suatu partai karena semua parpol mempunyai perilaku politik yang sama. (10) Kepindahan politikus dari suatu partai kepada partai lain adalah suatu fenomena ketidak konsistenan para elite partai terhadap ideologi, komitmen atau partai-partai tidak memiliki ideologi yang jelas dapat membedakan antara satu dengan lainnya. (11) Partai-partai ketika berkuasa atau bahagian dari kekuasaan terindikasi sarat dengan kasus suap dan korupsi serta tidak semua kasus itu terungkap ke publik karena "kecanggihan" parpol menutupi aib dan persekongkolan antara parpol dan aparat penegak hukum. (12) Kader yang paling diminati elite partai adalah kepala daerah yang telah berhasil merebut hati dan pikiran rakyat pemilih. (13) Sumber dana parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan dan dari APBN. Pendanaan parpol yang sarat konflik kepentingan menyeret ke arah korupsi kartel elite, korupsi ini melibatkan jaringan parpol, pengusaha, penegak hukum dan birokrasi. Konflik kepentingan

telah merusak kebijakan anggaran termasuk anggota DPR menjadi pemangsa. (14) Pengaruh figur atau citra Yudhoyono menyumbang 60 sampai dengan 70% untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum 2009 dan ikatan politik emosional mengandalkan kategori partai karismatik atau klientalistik.

### **Daftar Pustaka**

- Alfian. "Pemikiran dan perubahan politik di Indonesia". Jakarta : Gramedia, Jakarta, 1992
- Almond, G. A. "Sosialisasi, kebudayaan dan partisipasi politik. Dlm. Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews. (pnyt.). Perbandingan sistem politik", 33-52, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1991
- Apter, David E. "Analisa politik". LP3ES. Jakarta, 1987
- Beetham, David & Boyle, Kevin. "Demokrasi. Kanisius". Jakarta, 1998
- Dahl, Robert A. "Demokrasi dan para pengeritiknya". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1992.
- Duverger, Maurice. "Asal mula partai politik. Dlm. Ichlasul Amal (pnyt.). Teori-teori mutaakhir partai politik", hlm. 36-57. Tiara wacana. Yogyakarta, 1988
- Ebenstein, William. "To day's isms". *Englewood Cliffs*". Prentice Hall. New Jersey, 1967
- Gould, Caral C. 1998. "Rethinking Democracy : Freedom And Social Cooperation In Politics, Economic And Society". Cambridge University Press. New York, 1998
- Hadenius, Alex. "Democracy and Development". Cambridge University Press. Cambridge. 1992
- Haris, Syamsuddin. "Kemelut Partai Demokrat". Jakarta. Kompas, 7 Juni. 2011
- Haryatmoko, "Etika Publik dan Konflik Kepentingan", Jakarta. Kompas, 7 Juni. 2011
- Held, David. "Models of democracy". Cambridge Polity Press. Cambridge, 1993
- Hernowo.M. "Manajemen Partai Politik: Sumber daya yang terabaikan" Kompas, 30 Maret 2010.
- Hidayat, Syarif. "Too Much Too Soon: Local State Elite's Perspective on and the Puzzle of Contemporary" Indonesian Regional Autonomy Policy. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007
- Huntington, Samuel & Joan M. Nelson. "No easy choice: political participation in developing countries". Harvard University Press. Cambridge, 1976
- Huntington, Samuel P. "How countries democratise". *Political Science Quarterly* 106 (4): 579-616. 1992
- Kaldor, Mary & Ivan Vejvoda. "Democratization in Cenrral and East European Countries". *International Affair* 73 (4): 50-82. 1997



- Lijphart, Arend. 1980. *“Democracy in Plural Society: A Comparative Exploration”*. New Haven and London. Yale University Press. London. 1980
- Lowenthal, Abraham F. (pnyt.). “Transisi menuju demokrasi: rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian (Terj.)”. LP3ES. Jakarta. 1993
- Macpherson, C.B. “The Real world democracy”. Oxford University Press. New York. 1972
- Maswadi Rauf. “Demokrasi dan demokratisasi: penjabaran teoritis untuk Indonesia”. Jakarta: Mizan – Laboratorium Ilmu Politik FISIP-UI. Jakarta, 1998
- Mayo, Henry. 1965. “An Introduction to Democratic Theory”. Oxford University Press. New York, 1965
- Mehden, Fred R. Von Der. “Politik negar-negara membangun”. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1980
- Miriam Budiardjo.(pnyt) “Partisipasi dan partai politik”. Gramedia. Jakarta. 1980
- Neumann, Sigmun. “Kearah suatu studi perbandingan partai-partai politik. Dlm Meriam Budiardjo (pnyt). Partisipasi dan partai politik”. hlm. 59-108. Gramedia. Jakarta, 1982
- Organski. A.F.K. *“The stages of political development. Knopf*. New York. 1965
- Pennock, J Roland. Democratic political theory. Princeton University Press. Princeton, 1979
- Piliang, J. Indra, Partai Politik dab Demokrasi Deliberati. Analisa CSIS: vol:27-2. Jakarta. 2008
- Przeworski, Adam. *“Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America”*. Cambridge: Cambridge Universiti Press. Cambridge, 1991
- Pye, Lucian W. 1965. *“The concept of political development. Dlm. Annals of the American Academy of Political and Social Science”*. 48(2): 77-89. 1968
- Randall, Vicky. (pnyt.). *“Political parties in the Third World”*. Sage. 1998
- Rawls, John. “Political liberalism”. Columbia University Press. New York, 1993
- Rueschemeyer, Dictrich. E.H. Stephens and J.D. Stephens. *“Capitalist Development and Democracy. Polity Press”*. Cambridge, 1992
- Rustow, Dankwart A. *“Transitions to democracy: toward a dynamic model”*. *Comparative Politics* 2(4): 337-63. 1970
- Sartori, Giovanni. 1995. “How Far can Free Government Travel”. *Jurnal of Democracy* 6 (3). July : 101-111.
- Santoso, Ferry. “Keuangan Sisi Gelap Partai Politik”. Kompas, 31 Maret 2010.

- Schaltschneider, E.E. *“The Semisovereign People”*. Holt. Rinehart and Winston. New York, 1960
- Stepan, Alfred. *“Democratic opposition and democratization theory”*. Dlm. *Government and opposition* 32 (4) : 657-675. 1997
- Sundhaussen, Ulf. *“Refleksi terhadap parti politik dan Pemilu di Indonesia”*. *Prisma*. 25(8): 13-27. Jakarta. 1996
- Tomagola, Tamrin. *“Partai Para Penguasa”*. *Kompas*, 13 Juli. 2010
- Varma, S.P. 1995. *“Teori politik modern”*. Rajawali Press. Jakarta.1995
- Vredembregt, J. *“Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat”*. Jakarta: Gramedia. Jakarta. 1984
- Weiner, Myron dan Joseph La Palombara. 1981. *Pengaruh partai terhadap perkembangan politik*. Dlm. *Mariam Budiardjo (pnyt.) Partisipasi dan partai politik*. hlm. 155-201. Gramedia. Jakarta. 1981
- Yates, W. Ross. *“Democracy in The United states”*. Rand Mc Nally and Company. Chicago. 1967